

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DPPKBPM**

*Alamat : Komplek Pemda II, Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714,  
Tlp. 0274-6460055 ; Fax. 0274-6460055  
Email : [dppkbpm@bantulkab.go.id](mailto:dppkbpm@bantulkab.go.id)*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.**

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan :

1. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.
2. Sebagai Bahan Laporan dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2021.
3. Sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil – hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul mendanai seluruh kegiatan.
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.**

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. DPA-SKPD, Nomor : DPA/A.1/2.14.2.13.0.00.01.00/001/2021, Tanggal 4 Januari 2021;
11. DPPA-SKPD, Nomor : DPPA/B.1/2.14.2.13.0.00.01.00/001/2021, Tanggal 29 Oktober 2021.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.**

- Bab I   Pendahuluan
- Bab II   Ekonomi Makro
- Bab III   Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV   Kebijakan Akuntansi
- Bab V   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab VI   Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- Bab VII   Penutup



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul yang mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
2. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Untuk mewujudkannya, dalam pelaksanaan APBD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul diarahkan pada tujuan tersebut diatas.

**2.2. Kebijakan Keuangan**

masyarakat, maka dukungan dana APBD Kabupaten Bantul Sebagai Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk keberhasilan tugas pokok dan fungsi tersebut.

APBD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 21.209.386.146,00 .

APBD tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul terdiri dari :

- Belanja operasi : Rp. 19.769.632.266,00
- Belanja modal : Rp. 1.439.753.880,00

dan dialokasikan untuk membiayai:

No.	Program Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	33.720.000
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.493.420.750
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	3.838.906.140,00



	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.608.800,00
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.233.443.401,00
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.822.800,00
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.175.000,00
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.252.375,00
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.181.000,00
10.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.800.000,00
11.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000,00
12.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.412.620.880,00
13.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	838.475.000,00
14.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.325.513.250,00
15.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	877.017.000,00
16.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.042.350.000,00
17.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13.230.000,00
18.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	217.349.750,00
	Jumlah Pagu Anggaran	21.209.386.146,00

**2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.**

Indikator pencapaian target kinerja pada APBD tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN			
	Kegiatan	Indikator Kinerja	Tkt Capaian (Target)	Ket
1	2	3	4	5
Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkatkan 80% dari 70 Orang Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK, BKAD Meningkatkan Sebanyak 80% dari 34 Orang Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang	33720000 Rupiah 56 Orang 27 Orang 41 Orang	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkatkan 90% dari 80 Orang Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Meningkatkan 90% dari 80 Orang	20600000 Rupiah 72 Orang 72 Orang	

	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa</p>	<p>Laporan Kunjungan Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 110 Orang Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 orang Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% dari 90 Orang</p>	<p>308133000 Rupiah 1 Dokumen 1 Dokumen 88 Orang 72 Orang 72 Orang</p>	
--	---	---	--	--



	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cetak Buku Pedoman UP2K-PKK Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan meningkat 80% dari 75 orang Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat 80% dari 300 orang Pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100 orang Pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 315 orang	530707750 Rupiah 250 Buku 3 Dokumen 48 Orang 240 Orang 80 Orang 228 Orang 252 Orang
--	---	---	---

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Laporan Ekspos	1 Dokumen	
		Lomba Kalurahan	1 Dokumen	
		Laporan Pembinaan	1 Dokumen	
		Lomba Kalurahan	1 Dokumen	
		Laporan Pemutakhiran	1 Dokumen	
		Data EPDES KEL	1 Dokumen	
		Laporan Penilaian	1 Dokumen	
		Administrasi Lomba Kalurahan	438480000 Rupiah	
		Laporan Updating Data Profil Kalurahan	90 orang 72 Orang	
		Laporan Verifikasi Lapangan		
		Laporan Pembinaan Lomba Kalurahan		
		Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Kalurahan Meningkatkan 90% dari 100 orang		
		Pemahaman Peserta Bimtek Profil Kalurahan meningkat 90% dari 80 Orang		

<p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Jasa Tenaga Non ASN Laporan Evaluasi Capaian Input EHDW untuk Scorecard Konvergensi Stunting Laporan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Laporan Kegiatan SAPA NAKES Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 24755 penerima manfaat Laporan Pembaruan Data LPM Kelurahan se-Kabupaten Laporan Pendistribusian Alat/Bahan Protokol Kesehatan bagi 1.145 Posyandu Laporan Pendistribusian Buku Menu PMT Posyandu dan PMT AS Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award) Laporan Temu Karya LPMD Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90 Orang Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyanda meningkat 80% dari 150 orang <b>Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150 Orang</b> <b>Pemahaman Peserta</b></p>	<p>12 Bulan 1 Dokumen 30 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 72 Orang 120 Orang 24 Orang 41 Orang 2637994720 Rupiah</p>
---	---	--	---



		Posyandu meningkat 80 % dari 150 Orang		
		Pemahaman Peserta Pelatihan Terpadu		
		Posyandu di Lokasi KDN		
		TPST Piyungan Meningkat 80%		
		Pemahaman Peserta TOT		
		Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang		
	Fasilitasi	Jaminan Kecelakaan	12 Bulan	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kerja Bagi Non ASN	12 Bulan	
	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jaminan Kematian Bagi Non ASN	12 Bulan	
	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	3 Dokumen	
	Posyandu, LPM, dan Karang	Jasa Tenaga Non ASN	1 Dokumen	
	Taruna), Lembaga Adat	Laporan Gladi Bersih	1 Dokumen	
	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan Launching	3 Dokumen	
		BKK/P2MD	1 Dokumen	
		Laporan Monev	3 Dokumen	
		BKK/P2MD	3 Dokumen	
		Laporan Monitoring	1 Dokumen	
		PAB	1 Dokumen	
		Laporan Sosialisasi	1 Dokumen	
		TMMD	144 Orang	
		Laporan Survey Lokasi	90 Orang	
		TMMD	144 Orang	
		Laporan Upacara	180 Orang	
		Pembukaan TMMD	90 Orang	
		Sengkuyung		
		Laporan Upacara		
		Penutupan TMMD		
		Sengkuyung		
		Laporan Verifikasi		
		BKK/P2MD		
		Laporan Verifikasi		
		Proposal PPAB		
		Laporan Verifikasi TMMD		
		Pemahaman Peserta		
		Bimtek Bantuan Keuangan Kepada		
		Pemerintah Desa		
		meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)		

		<p>Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)</p> <p>Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkatkan 90% dari 100 Orang</p> <p>Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)</p> <p>Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang</p> <p>Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkatkan 90% dari 100 Orang</p>		
	<p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Laporan Monitoring program pendukung</p> <p>Laporan Penguatan Program Lanjutan</p> <p>Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 70 orang</p> <p>Pemahaman Peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari 120 orang</p> <p>Pemahaman peserta peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>56 orang</p> <p>96 Orang</p> <p>52 orang</p> <p>146600000</p> <p>Rupiah</p>	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 Orang 41 Orang 41 Orang 93047500 Rupiah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA DPPA Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Jasa Tenaga Non ASN RKA	1 dokumen 1 dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 82608800 Rupiah	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	5 Dokumen 8000000 Rupiah	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja	14 Kali 44 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis 138387 Lembar	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Indikator Anggaran Kegiatan	3 Macam 3 Macam 3600000 Rupiah	



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Penyediaan Makan Minum Tamu Perjalanan ke Dalam Daerah Perjalanan Ke Luar daerah	18 Dokumen 410 Orang 888 Op 78 Op		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	1 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	8400000 Rupiah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Internet Penyediaan Alat Listrik Penyediaan Rekening Telepon	12 Bulan 3 Jenis 12 Buah		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	48 Jenis		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Jasa Pengelola Administrasi Keuangan Jasa Tenaga Non ASN Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Perawatan Kendaraan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 192 Orang/Bulan 12 Bulan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5000 Dokumen	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Pelayanan KB	45686 Liter 44 Unit 9 Unit 101 Unit 10 Unit 1 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	9 Jenis	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	1 Unit	

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Indikator Anggaran Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	16800000 Rupiah 12 Dokumen	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku Laporan Program KKBPK Tk Dusun Cetak F/1/Dal/Dus	1000 Buku 1000 Buku	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Indikator Anggaran Kegiatan Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang	59500000 Rupiah 75 orang 1010 orang	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Alat Tulis Kantor ( DAK Non Fisik ) Dukungan Manajemen BOKB ( DAK Non Fisik ) Penggandaan ( DAK Non Fisik ) Publikasi KIE Melalui Media Cetak (DAK Non Fisik) Publikasi KIE Melalui Media Elektronik ( DAK Non Fisik )	13 Jenis 6 Jenis 14066 Lembar 6 Jenis 2 Jenis	



	<p>Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p>	<p>Alat Tulis Kantor            Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN            Jaminan Kematian Bagi Non ASN            Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN            Jasa Tenaga Non ASN            Penggandaan            Penggunaan Media Cetak Untuk Iklan            Layanan Masyarakat dalam Program KB</p>	<p>17 Jenis            12 Bulan            12 Bulan            12 Bulan            12 Bulan            5171 Lembar            6 Jenis</p>	
	<p>Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KBPK</p>	<p>Publikasi KIE Melalui Media Cetak            Publikasi Melalui Mobil            Penerangan (Mupen)</p>	<p>6 Jenis            3 kali</p>	
	<p>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p>	<p>Indikator Anggaran Kegiatan Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 150 Orang</p>	<p>13000000 Rupiah            120 Orang</p>	

	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	<p>Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)</p> <p>Laporan kegiatan operasional' orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)</p> <p>Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)</p> <p>Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik)</p> <p>Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)</p> <p>Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)</p> <p>Pembayaran Rekening Internet</p> <p>Pembayaran Rekening Listrik</p> <p>Penggandaan (DAK Non Fisik)</p>	<p>55 Jenis</p> <p>54 dokumen</p> <p>54 dokumen</p> <p>17 dokumen</p> <p>2040 Buah</p> <p>4080 orang</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>206084 Lembar</p>	
	Pengendalian Program KKBPK	<p>Indikator Anggaran Kegiatan</p> <p>Sosialisasi Program KKBPK</p>	<p>46500000 Rupiah</p> <p>570 Orang</p>	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<p>Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,</p> <p>Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</p>	<p>Indikator Anggaran Kegiatan</p> <p>Laporan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten</p> <p>Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat</p> <p>Sebanyak 90% dari 100 Orang</p>	<p>87535000 Rupiah</p> <p>1 Dokumen</p> <p>90 Orang</p>	

	Penggerakan Kader Instifusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD Sejumlah 7090 Orang Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik) Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)	7090 Orang 12 Dokumen 12 Dokumen 8 Dokumen 72 Dokumen	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Bahan Bakar Minyak (DAK Non Fisik) Obat - Obatan Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik) Penggandaan ( DAK Non Fisik ) Visitasi dan Registrasi Faskes (DAK Non Fisik)	2720 Liter 4 Jenis 3 Jenis 2084 Lembar 2 Jenis	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Indikator Anggaran Kegiatan Laporan Keikutsertaan KB MKJP Laporan Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik)	941116250 Rupiah 1 Dokumen 2 Dokumen	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK Fisik)	5 Jenis	



	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Advokasi dan KIE KRR Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Dialog Interaktif Radio Komunitas Pemahaman peserta tentang PUP meningkat 90% dari 250 Orang	90 Orang 18 orang 225 Orang	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Evaluasi PPKB Indikator Anggaran Kegiatan Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen 34100000 Rupiah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Indikator Anggaran Kegiatan Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	65250000 Rupiah 1 Dokumen	

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Gelar Produk UPPKS Gelar Tribina Penyuluhan Narkoba Penyuluhan Triat KRR Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi Pertemuan Forum Genre Tingkat Kecamatan Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung KB (DAK Non Fisik) Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rakor Kap. Rakor Desa dan Minlok (DAK Non Fisik)	54 Dokumen 17 Dokumen 1 Kali 72 Dokumen 54 Dokumen	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS))	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan) Pengadaan KIT siap nikah anti Stunting (DAK Fisik Penugasan)	10 Unit 10 Unit	

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkatkan sebanyak 80% dari 135 orang	108 Orang	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina dan UPPKS Pemahaman peserta orientasi kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang Pemahaman peserta orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 60 orang Pengadaan BKB Kit Pengadaan Kit Siap Nikah Peralatan Lapangan Publikasi genre Publikasi Tribina Sarana PPKBD (Genre)	1 Dokumen 72 Orang 54 Orang 8 Unit 35 Unit 1 Jenis 2 Jenis 6 Jenis 1 Jenis	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 orang (DAK Non Fisik) Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi dan Stunting Calon Manten meningkat 90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)	2700 orang 1260 orang	



Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Indikator Anggaran Kegiatan Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	13230000 Rupiah 12 Dokumen	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Papan Nama Kalurahan Sosialisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan bagi Pemerintah Kalurahan	1 Dokumen 75 Papan Nama 1 Kali	

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Capaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul tahun 2021 sebesar 94,74 %. Adapun kegiatan meliputi :

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1.	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	33.720.000,00	33.720.000,00	0,00	100,00
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.493.420.750,00	1.421.722.750,00	71.698.000,00	95,20
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.838.906.140,00	3.743.383.223,00	95.522.917,00	97,51
4.	Perencanaan, Penganggaran,	90.608.800,00	86.170.190,00	4.438.610,00	95,10

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.233.443.401,00	4.823.368.036,00	410.075.365,00	92,16
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.822.800,00	528.275.850,00	43.546.950,00	92,38
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.175.000,00	24.950.630,00	2.224.370,00	91,81
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.252.375,00	339.385.923,00	13.866.452,00	96,07
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.181.000,00	707.279.905,00	22.901.095,00	96,86
10.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.800.000,00	16.320.000,00	480.000,00	97,14
11.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000,00	93.500.000,00	0,0	100,00
12.	Pelaksanaan	2.412.620.880,00	2.331.333.665,00	81.287.215,00	96,63



	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
13.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	838.475.000,00	834.789.500,00	3.685.500,00	99,56
14.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.325.513.250,00	2.073.016.300,00	252.496.950,00	89,14
15.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	877.017.000,00	855.817.000,00	21.200.000,00	97,58
16.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	2.042.350.000,00	1.962.065.000,00	80.285.000,00	96,07

	Kesejahteraan Keluarga				
17.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13.230.000,00	12.670.000,00	560.000,00	95,77
18.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	217.349.750,00	206.849.750,00	10.500.000,00	95,17
	Jumlah Pagu Anggaran	21.209.386.146,00	20.094.617.722,00	1.114.768.424,00	94,74

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Secara umum, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan telah dapat direalisasikan, adapun sisa merupakan efisiensi dan sisa pengadaan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian yang ditetapkan adalah :

Dengan adanya PPKM yang diberlakukan beberapa kali di Tahun Anggaran 2021 maka jadwal pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tertunda dan dilaksanakan pada saat PPKM di cabut , kurangnya kuantitas SDM di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dimana di Bidang Pengendalian Penduduk dan Kasubag Program, eselon IV nya tidak mempunyai staf PNS.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul sudah berusaha untuk menerapkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut :

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

#### **4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

##### **a. Kas dan setara kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Umum daerah, terdiri dari atas saldo rekening di Kas Daerah setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.



Setara kas, antara lain berupa desposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggungjawab /dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas penerimaan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### **b. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan ( supplies ) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan . Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

### **c. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- Investasi Nonpermanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang , penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- Investasi Permanen

Investasi permanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat social . Investasi permanent dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas :

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik Negara ;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara, Pemerintah Daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan ;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga ;
- Investasi permanen lainnyayang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan

Penyertaan modal pemerintah daerah menggambarkan jumlah yang umum. Aset dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikan 51 % atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% sahan ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu

#### **d. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

- Klarifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan jaringan
- Aset tetap lainnya



- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

#### **e. Aset lainnya**

Aset lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

1. Aset tak berwujud
2. Tagihan penjualan angsuran
3. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

#### **f. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

#### **g. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga



- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Utang Jangka Pendek Lainnya

#### ***h. Kewajiban Jangka Panjang***

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### ***i. Ekuitas Dana***

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek .

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

#### ***j. Belanja***

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

### ***4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan***

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukan penyusutan terhadap aset tetap.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Rincian dan penjelasan realisasi masing-masing pos pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan : nihil
- Aset Tetap : Rp. 1.363.451.130,00
- Belanja Operasi
  - Belanja Pegawai : Rp. 4.992.078.036,00
  - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 13.544.588.556,00
  - Belanja Hibah : Rp. 194.500.000,00
- Belanja Modal
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 1.338.500.500,00
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 24.950.630,00

Adapun Neraca Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2021

No	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>ASET</b>	
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>	
<b>111</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>
11101	Kas di Kas Daerah	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00
<b>113</b>	<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>
11301	Piutang Pajak	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
11306	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00
1130601	Piutang Pendapatan Lainnya (Bruto)	0,00
1130602	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00
<b>114</b>	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>
11401	Belanja Dibayar Dimuka	0,00
11501	Piutang Lainnya	0,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00
<b>117</b>	<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>0,00</b>
11701	Piutang Lain-lain	0,00
<b>119</b>	<b>Persediaan</b>	<b>206.044.670,00</b>
11901	Persediaan	206.044.670,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>206.044.670,00</b>
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>	
13101	Tanah	16.125.000,00
<b>132</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>9.207.400.106,01</b>
13201	Peralatan dan Mesin	9.207.400.106,01
<b>133</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>7.267.539.634,00</b>
13301	Gedung dan Bangunan	7.267.539.634,00



No	Uraian	Jumlah
<b>134</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>113.678.478,00</b>
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.678.478,00
<b>135</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>242.857,00</b>
13501	Aset Tetap Lainnya	242.857,00
<b>136</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
<b>137</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(8.091.167.972,65)</b>
13701	Akumulasi Penyusutan	(8.091.167.972,65)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>8.513.818.102,36</b>
<b>15</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00
15301	Aset Tak Berwujud	64.550.000,00
15401	Aset Lain-lain	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
15601	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(51.640.000,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>12.910.000,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>8.732.772.772,36</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
21201	Utang Bunga	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
21501	Utang Belanja	272.678,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>272.678,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>272.678,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	
<b>31</b>	<b>EKUITAS</b>	
<b>311</b>	<b>Ekuitas</b>	
31101	Ekuitas	8.732.500.094,36
31102	Koreksi Ekuitas	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>8.732.500.094,36</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>8.732.772.772,36</b>

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul jumlah SDM nya per 31 Desember 2021 sebanyak 124 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

1. ASN : 41 orang
  2. Non ASN : 48 orang
  3. ASN Fungsional : 35 orang (Pegawai BKKBN Pusat)
- Untuk 35 orang pegawai BKKBN Pusat di gaji oleh BKKBN Pusat

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Bantul, 31 Desember 2021  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Dra. Sri Nuryanti, M.Si  
NIP. 196707101993032008





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

**SATKER : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA**

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	8.388.504.525,58	8.431.542.303,00
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(19.472.117.880,22)	(15.534.320.385,43)
3	ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	20.094.617.722,00	16.738.136.792,00
31	R/K SKPD	0,00	16.738.136.792,00
32	R/K PPKD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(278.504.273,00)	(1.246.854.183,99)
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	(278.504.273,00)	(1.246.854.183,99)
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>8.732.500.094,36</b>	<b>8.388.504.525,58</b>

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

**Dra. Sri Nuryanti, M.Si.**  
196707101993032008



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**NERACA SKPD**

PER : 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SATKER : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

SUB UNIT : UNIT INDUK

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
<b>1</b>	<b>ASET</b>				
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>				
<b>111</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11201	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114</b>	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11401	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11701	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>119</b>	<b>Persediaan</b>	<b>206.044.670,00</b>	<b>100.216.811,00</b>	<b>105.827.859,00</b>	<b>105,60</b>
11901	Persediaan	206.044.670,00	100.216.811,00	105.827.859,00	105,60
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>206.044.670,00</b>	<b>100.216.811,00</b>	<b>105.827.859,00</b>	<b>105,60</b>
<b>12</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Jumlah		Kenaikan / (Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
12202	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>				
131	Tanah	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00
13101	Tanah	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	9.207.400.106,01	8.122.696.106,01	1.084.704.000,00	13,35
13201	Peralatan dan Mesin	9.207.400.106,01	8.122.696.106,01	1.084.704.000,00	13,35
133	Gedung dan Bangunan	7.267.539.634,00	7.267.539.634,00	0,00	0,00
13301	Gedung dan Bangunan	7.267.539.634,00	7.267.539.634,00	0,00	0,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.678.478,00	113.678.478,00	0,00	0,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.678.478,00	113.678.478,00	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	242.857,00	0,00	242.857,00	0,00
13501	Aset Tetap Lainnya	242.857,00	0,00	242.857,00	0,00
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(8.091.167.972,65)	(7.257.333.302,43)	(833.834.670,22)	11,49
13701	Akumulasi Penyusutan	(8.091.167.972,65)	(7.257.333.302,43)	(833.834.670,22)	11,49
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>8.513.818.102,36</b>	<b>8.262.705.915,58</b>	<b>251.112.186,78</b>	<b>3,04</b>
<b>15</b>	<b>ASET LAINNYA</b>				
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Aset Tak Berwujud	12.910.000,00	25.820.000,00	(12.910.000,00)	(50,00)
15301	Aset Tak Berwujud	64.550.000,00	64.550.000,00	0,00	0,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(51.640.000,00)	(38.730.000,00)	(12.910.000,00)	33,33
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>12.910.000,00</b>	<b>25.820.000,00</b>	<b>(12.910.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>8.732.772.772,36</b>	<b>8.388.742.726,58</b>	<b>344.030.045,78</b>	<b>4,10</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	272.678,00	238.201,00	34.477,00	14,47
21501	Utang Belanja	272.678,00	238.201,00	34.477,00	14,47
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>272.678,00</b>	<b>238.201,00</b>	<b>34.477,00</b>	<b>14,47</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>272.678,00</b>	<b>238.201,00</b>	<b>34.477,00</b>	<b>14,47</b>



No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	8.732.500.094,36	8.388.504.525,58	343.995.568,78	4,10
	JUMLAH EKUITAS	8.732.500.094,36	8.388.504.525,58	343.995.568,78	4,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.732.772.772,36	8.388.742.726,58	344.030.045,78	4,10

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Dra. Sri Nuryanti, M.Si.  
196707101993032008



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT, DAN DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

PERIODE : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

HAL: 1 / 4

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
<b>8</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>	
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>18.625.373.210,00</b>
<b>8.1.01</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>4.992.078.036,00</b>
<b>8.1.01.01</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.064.100.182,00</b>
<b>8.1.01.01.01</b>	<b>Beban Gaji Pokok ASN</b>	<b>2.322.061.900,00</b>
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.322.061.900,00
<b>8.1.01.01.02</b>	<b>Beban Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>198.282.718,00</b>
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	198.282.718,00
<b>8.1.01.01.03</b>	<b>Beban Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>177.770.000,00</b>
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	177.770.000,00
<b>8.1.01.01.05</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>66.520.000,00</b>
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	66.520.000,00
<b>8.1.01.01.06</b>	<b>Beban Tunjangan Beras ASN</b>	<b>110.005.980,00</b>
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	110.005.980,00
<b>8.1.01.01.07</b>	<b>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>15.779.497,00</b>
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.779.497,00
<b>8.1.01.01.08</b>	<b>Beban Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>30.768,00</b>
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	30.768,00
<b>8.1.01.01.09</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>154.764.985,00</b>
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	154.764.985,00
<b>8.1.01.01.10</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>4.721.030,00</b>
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.721.030,00
<b>8.1.01.01.11</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>14.163.304,00</b>
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.163.304,00
<b>8.1.01.02</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1.759.267.854,00</b>
<b>8.1.01.02.05</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>	<b>1.759.267.854,00</b>
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.759.267.854,00
<b>8.1.01.03</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>168.710.000,00</b>
<b>8.1.01.03.07</b>	<b>Beban Honorarium</b>	<b>168.710.000,00</b>
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	157.360.000,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.350.000,00
<b>8.1.02</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>13.438.795.174,00</b>
<b>8.1.02.01</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>6.463.084.391,00</b>
<b>8.1.02.01.01</b>	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>6.463.084.391,00</b>
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	44.541.000,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	510.012.600,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	106.325.000,00



No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	884.668.850,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.718.500,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	798.210.000,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	35.979.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	(91.500,00)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.460.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.572.000,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.400.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	218.092.500,00
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	(192.202.470,00)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	99.390.411,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.625.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.479.319.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.075.000,00
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.615.272.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	730.717.500,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	3.000.000,00
<b>8.1.02.02</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>3.175.152.978,00</b>
<b>8.1.02.02.01</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>2.600.457.781,00</b>
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	709.700.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	151.975.000,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	427.488.550,00
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	661.200.000,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	17.500.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	319.200.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.600.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	45.600.000,00
8.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka	21.600.000,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	22.800.000,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	89.650.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	3.064.463,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	26.986.978,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.444.190,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.548.600,00
<b>8.1.02.02.02</b>	<b>Beban luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>28.237.197,00</b>
8.1.02.02.02.0005	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.684.400,00
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.036.680,00



No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.516.117,00
<b>8.1.02.02.03</b>	<b>Beban Sewa Tanah</b>	<b>500.000,00</b>
8.1.02.02.03.0017	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	500.000,00
<b>8.1.02.02.04</b>	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>46.738.000,00</b>
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.738.000,00
<b>8.1.02.02.05</b>	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>71.740.000,00</b>
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	71.740.000,00
<b>8.1.02.02.07</b>	<b>Beban Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>7.500.000,00</b>
8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	7.500.000,00
<b>8.1.02.02.12</b>	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>419.980.000,00</b>
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	24.100.000,00
8.1.02.02.12.0002	Beban Sosialisasi	366.110.000,00
8.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis	29.770.000,00
<b>8.1.02.03</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>290.547.405,00</b>
<b>8.1.02.03.02</b>	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>153.180.718,00</b>
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	64.705.718,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.450.000,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.750.000,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	935.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.350.000,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.840.000,00
<b>8.1.02.03.03</b>	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>137.366.687,00</b>
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	137.366.687,00
<b>8.1.02.04</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>451.380.400,00</b>
<b>8.1.02.04.01</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	<b>451.380.400,00</b>
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	186.855.400,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	247.025.000,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.500.000,00
<b>8.1.02.05</b>	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>3.058.630.000,00</b>
<b>8.1.02.05.01</b>	<b>Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>449.900.000,00</b>
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	343.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	106.900.000,00
<b>8.1.02.05.02</b>	<b>Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>2.608.730.000,00</b>
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.733.050.000,00
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	875.680.000,00
<b>8.1.05</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>194.500.000,00</b>
<b>8.1.05.05</b>	<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>194.500.000,00</b>
<b>8.1.05.05.02</b>	<b>Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>194.500.000,00</b>
8.1.05.05.02.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	194.500.000,00
<b>8.2</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>846.744.670,22</b>
<b>8.2.01</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>685.380.200,89</b>
<b>8.2.01.02</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>	<b>685.380.200,89</b>

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.2.01.02.01	<b>Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>685.380.200,89</b>
8.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	685.380.200,89
8.2.02	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>145.350.792,68</b>
8.2.02.01	<b>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>145.350.792,68</b>
8.2.02.01.01	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>145.350.792,68</b>
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	145.350.792,68
8.2.03	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>3.103.676,65</b>
8.2.03.04	<b>Beban Penyusutan Jaringan</b>	<b>3.103.676,65</b>
8.2.03.04.02	<b>Beban Penyusutan Jaringan Listrik</b>	<b>3.103.676,65</b>
8.2.03.04.02.0003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	3.103.676,65
8.2.06	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>12.910.000,00</b>
8.2.06.01	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>12.910.000,00</b>
8.2.06.01.01	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>12.910.000,00</b>
8.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	12.910.000,00
	<b>JUMLAH BEBAN DAERAH</b>	<b>19.472.117.880,22</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(19.472.117.880,22)</b>

Bantul, 31 Desember 2021

Pegguna Anggaran

Dra. Sri Nuryanti, M.Si.  
NIP. 196707101993032008





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD**  
**PER REKENING JENIS**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021**

SATKER : 2.14.2.13.0.00.01.00      DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
5	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
	<b>BELANJA DAERAH</b>						
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	19.769.632.266,00	0,00	18.731.166.592,00	18.731.166.592,00	(1.038.465.674,00)	94,75
5.1.01	Belanja Pegawai	5.405.203.401,00	0,00	4.992.078.036,00	4.992.078.036,00	(413.125.365,00)	92,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.169.928.865,00	0,00	13.544.588.556,00	13.544.588.556,00	(625.340.309,00)	95,59
5.1.05	Belanja Hibah	194.500.000,00	0,00	194.500.000,00	194.500.000,00	0,00	100,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.439.753.880,00	0,00	1.363.451.130,00	1.363.451.130,00	(76.302.750,00)	94,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.412.579.000,00	0,00	1.338.500.500,00	1.338.500.500,00	(74.078.500,00)	94,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.174.880,00	0,00	24.950.630,00	24.950.630,00	(2.224.250,00)	91,82
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	21.209.386.146,00	0,00	20.094.617.722,00	20.094.617.722,00	(1.114.768.424,00)	94,74
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(21.209.386.146,00)	0,00	(20.094.617.722,00)	(20.094.617.722,00)	1.114.768.424,00	94,74
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(21.209.386.146,00)	0,00	(20.094.617.722,00)	(20.094.617.722,00)	1.114.768.424,00	94,74

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Dra. Sri Nuryanti, M.Si.

NIP. 196707101993032008